



ANALISIS PERSPEKTIF GURU TERHADAP INDEKS NILAI PENDIDIKAN INKLUSIF

Waode Eti Hardiyanti¹, Muhammad Ilham², Yenti Juniarti³

PGPAUD Universitas Negeri Gorontalo^{1,3}, IAIN Kendari²
waode@ung.ac.id, muhammadilham@iainkendari.ac.id,
yenti@ung.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to investigate the implementation of inclusive education index from Booth and Ainscow. This paper reports a qualitative case study that explored seven early childhood teachers' views in Gorontalo about how policy and practice of inclusive in their settings. Data were taken through questionnaires and open-ended question adapted from inclusive education index. The result shows that some teachers feel as outsiders which tend to create the segregation amongst teachers. Meanwhile, others think they need to get support to truly understand what is the value of inclusive and help to provide the needs of each child. These supports can come from other teachers, researchers, or other professions as part of their professional development to implement inclusive education. Then by encouraging feedback and a mentoring program, the opportunity of being flexible, adaptable and resourceful enhance teacher to be reflective on thinking if how to be an inclusive teacher. Therefore, a genuine leader that support inclusive values produce written expectations about how people work together, use resources and provide educational programs for students in the school.

Keywords : teachers' views; inclusive education; policy and practice

A. PENDAHULUAN

Gagasan yang muncul tentang pendidikan inklusif dipandang sebagai reformasi sistem pendidikan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua murid. Realisasi agenda ini penting untuk mendukung masyarakat demokratis di mana keberagaman diterima. Pendidikan inklusif mendengarkan dan menghargai semua anak terlepas dari kemampuan, budaya, agama mereka dan kondisi sosial ekonomi. Meski istilahnya pendidikan inklusif berfokus pada memberikan keadilan dan mengurangi semua jenis diskriminasi, namun umumnya

ANALISIS PERSPEKTIF GURU TERHADAP INDEKS NILAI PENDIDIKAN INKLUSIF

Waode Eti Hardiyanti¹, Muhammad Ilham², Yenti Juniarti³

PGPAUD Universitas Negeri Gorontalo^{1,3}, IAIN Kendari² | 1

perdebatan yang terjadi biasanya berkuat mengenai segregasi atau pemisahan, terutama kepada anak-anak penyandang cacat. Mandat khusus inklusif pendidikan adalah untuk menyediakan akses bagi siswa penyandang cacat di sekolah dan di ruang kelas dengan memberikan dukungan agar berhasil (Inclusive International, 2009).

Melaksanakan pendidikan inklusif di Indonesia tidak bebas dari perdebatan, terutama memosisikan dan membingkai pola pikir serta peran guru (Kurniawati, et al., 2012). Alasannya adalah karena pendidikan inklusif dipandang tidak sesuai untuk negara berkembang, seperti Indonesia, dalam hal budaya, sumber daya, tingkat pendidikan guru dan khususnya model atau standar anak yang berkebutuhan khusus (Mitchell, 2014). Masalah kesehatan dan pendidikan di negara-negara berkembang telah menciptakan kesenjangan besar dalam hasil pendidikan bagi siswa itu sendiri, dibandingkan dengan negara maju. Dikatakan bahwa pengambilan kebijakan yang lambat ini menghambat inklusif sosial dan pendidikan di seluruh dunia (Kaplan, Lewis & Mumba, 20007). Namun, hambatan untuk inklusi tidak hanya ekonomi tetapi juga budaya dan tergantung pada implementasi kebijakan ini dalam pendidikan (Kaplan, et al., 2007).

Pendidikan inklusif diartikan bahwa semua siswa dapat bersekolah dan disambut oleh sekolah di lingkungan mereka dimana mereka dapat ditempatkan pada kelas reguler yang sesuai dengan usia dan diberikan dukungan untuk belajar, berkontribusi dan berpartisipasi dalam semua aspek kegiatan di sekolah. Pada tahun 1992, *Disability Discrimination Act* (DDA) di Australia mewajibkan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang-orang dengan latar belakang yang beragam dan memastikan setiap individu memiliki kesetaraan hak dalam pendidikan dan kesehatan (Loreman, et al., 2011). Secara umum, tindakan ini memperlihatkan dua jenis diskriminasi yang terjadi di masyarakat dengan perlakuan yang kurang menguntungkan pada golongan tertentu dan pengecualian yang tidak adil.

Secara historis, pendidikan inklusif terjadi untuk mengubah struktur masyarakat. Di masa lalu, ada pemisahan besar dalam masyarakat berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Pendidikan, misalnya, bukan hak universal dan hanya tersedia untuk kelompok tertentu (Pearson, 2016), dan perempuan diperlakukan tidak setara untuk mengakses pendidikan dengan dominasi dari laki-laki. Di Amerika Serikat pada pertengahan 1950-an, masalah rasial telah mengakibatkan diskriminasi anak-anak di sekolah berdasarkan warna kulit mereka (Carrington & Macarthur, 2012). Oleh karena itu, perlakuan yang tidak setara di antara masyarakat menyebabkan pergerakan hak untuk menantang nilai-nilai dan stereotip yang berlaku dimasyarakat saat itu, utamanya pergerakan untuk menentang perilaku diskriminasi antar warna kulit yaitu, keturunan Eropa yang berkulit putih dan Afrika yang berkulit hitam.

Untuk mencegah segala bentuk diskriminasi, undang-undang, dan kebijakan harus diberlakukan untuk membuat kesadaran akan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, salah satu kebijakan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak berkebutuhan khusus adalah melalui penyesuaian yang wajar atau *reasonable adjustment*. Ini didukung oleh DDA yang bertujuan untuk memberikan anak-anak berkebutuhan khusus peluang yang sama dengan anak lainnya (Queensland Government, 2010). Melalui penyesuaian yang wajar, siswa berkebutuhan khusus diberikan beberapa bantuan dalam hal memenuhi kebutuhan mereka.

Gerakan pendidikan inklusif yang paling signifikan adalah *Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (UNESCO) pada tahun 1994. Lebih dari sembilan puluh negara hadir untuk mendukung pendidikan inklusif dan berkomitmen meningkatkan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (UNESCO 1994). Semua sekolah harus mengakomodasi semua anak terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, linguistik atau lainnya (UNESCO, 1994). Ini mencerminkan bahwa fokus pendidikan inklusif bukan hanya menyediakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tetapi untuk semua anak yang mungkin terpinggirkan atau kelompok rentan dalam masyarakat. Karena itu, pendidikan inklusif benar-benar sejalan dengan *Salamanca Statement* dengan mengakui keberagaman setiap individu sebagai karakteristik yang memiliki keunikan masing-masing. Selain itu, anak berkebutuhan khusus seharusnya tidak terlihat sebagai individu yang pasif tetapi harus dilihat sebagai individu yang potensial dan dapat berkontribusi pada sosial ekonomi suatu negara.

Konsep Pendidikan Inklusif

Perkembangan pendidikan inklusif telah berubah dalam hal definisi, kebijakan dan praktiknya. Secara historis, perbedaan mengenai kemampuan, budaya agama, ras adalah masalah utama yang menciptakan pemisahan dalam pendidikan. Pengecualian terjadi ketika siswa ditolak atau diabaikan oleh sekolah karena perbedaan mereka, oleh karena itu, siswa yang mengalami pengucilan lebih cenderung gagal dalam akademik dan merasa terpinggirkan dalam masyarakat (Carrington & Macarthur, 2012). Sementara itu, penyandang disabilitas adalah salah satu masalah utama dalam penolakan dimasyarakat. Sebagian besar dilihat dari dua perspektif, model medis dan sosial.

Dalam model medis, anak-anak dengan kesulitan fisik dan mental akan diberi diagnosis, pengobatan, dan pelabelan (Pearson, 2016). Hal ini dipandang sebagai kekurangan anak-anak tersebut harus disembuhkan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam masyarakat (Graham, 2017). Pada titik yang lebih ekstrem, orang akan memandang penyandang disabilitas sebagai tragedi dan perlu disembuhkan atau dinormalisasi. Selanjutnya, sekolah khusus diciptakan untuk membantu siswa penyandang cacat di mana mereka dianggap tidak mampu

menghadapi dunia biasa. Skrtic (sebagaimana dikutip dari Danforth & Jones, 2015, hlm. 7) berpendapat bahwa pendidikan khusus atau biasa dikenal dengan sekolah luar biasa (SLB) menunjukkan irasionalitas dan tidak efektif baik dalam bentuk konseptual dan praktis.

Tantangan Penerapan Pendidikan Inklusif

Mengingat deskripsi pendidikan inklusif, tidak mengherankan bahwa penerapan pendidikan inklusif bisa menjadi rumit dan menantang. Masalah pertama yang menghalangi implementasi pendidikan inklusif adalah kemajuan moral untuk mengubah sikap terhadap keberagaman. Pemangku kepentingan di sekolah, orang tua dan masyarakat harus berbagi visi yang sama menuju pendidikan inklusif agar memiliki komunikasi yang kuat dan bantuan profesional lainnya (Carrington & Macarthur, 2012). Namun, mengubah visi seseorang bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika mayoritas orang di sekitar kita tidak tahu tentang masalah ini. Selanjutnya, memberikan pengembangan profesional bagi guru dapat menjadi solusi dan membawa manfaat bagi pendidikan inklusif. Itu karena beberapa guru mungkin menghadapi dilema ketika memiliki siswa berkebutuhan khusus tetapi tidak yakin apakah mereka dapat memenuhi semua kebutuhan siswa tersebut. Melalui pengembangan profesional, mereka berpeluang memiliki pengetahuan dan dukungan yang mereka butuhkan (Hardiyanti, Ilham & Suziman, 2020).

Kedua, globalisasi telah memaksa orang untuk menjadi lebih kompetitif. Sebagian besar sistem pendidikan telah menggunakan kebijakan tes standar untuk semua siswa dan hasil tes mereka akan menjadi penting untuk kesuksesan mereka. Orang tua akan fokus pada sekolah yang memiliki kemampuan mencetak murid dengan skor terbaik untuk pilihan mereka. Keadaan ini akan mempengaruhi penerapan dari pendidikan inklusif karena sekolah lebih cenderung menginginkan siswa yang “normal” untuk menjaga dan mempertahankan nilai skor tinggi mereka dan lebih memilih anak-anak dengan status ekonomi yang baik untuk pendanaan. Anak-anak yang terpinggirkan cenderung ditempatkan di sekolah berkualitas rendah. Tindakan ini melanggar hak anak untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Karena itu, keterlibatan aktif orang tua, guru, dan masyarakat untuk menantang praktik yang tidak setara dalam nilai mulia pendidikan harus didorong.

Pemahaman internasional tentang pendidikan inklusif telah beralih dari penekanan pada siswa penyandang cacat, ke fokus pada peluang pendidikan untuk semua orang dalam keberagaman, baik kemampuan, status sosial, dan agama (Carrington & Macarthur, 2012). Namun, data yang tersedia untuk memberikan penjelasan tentang pemahaman pendidikan inklusif dengan definisi yang terbaru sangat kurang.

Untuk lebih memahami bagaimana pendidikan inklusif diartikan dalam konteks pendidikan di Indonesia, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas

isu tersebut. Akan tetapi, lingkup dari penelitian ini akan berfokus untuk membahas salah satu indeks kebijakan dan praktik dari pendidikan inklusif menurut kuesioner menurut Booth dan Ainscow (2011), yang telah dimodifikasi sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Cakupan dari penelitian adalah menginvestigasi perspektif guru PAUD, yang terdiri dari dua hal yaitu: memahami bagaimana kebijakan dalam memberikan bantuan bagi guru baru untuk beradaptasi di sekolah dan pengaplikasian bantuan dan kolaborasi yang diperlukan bagi guru guna menyediakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid di Kota Gorontalo. Perspektif dan pemahaman guru sangat penting diketahui dimana guru dapat dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan yang juga secara umum memberikan deskripsi singkat mengenai potret pemahaman akan nilai dari pendidikan inklusif itu sendiri.

Penelitian ini berfokus secara spesifik pada pemahaman dari perspektif guru PAUD mengenai kebijakan dan praktik sekolah saat ini berdasarkan nilai-nilai inklusif menggunakan indeks untuk inklusif dari Booth dan Ainscow (2011) di kota Gorontalo. Tujuan pertama dari proyek ini adalah menyelidiki kebijakan sekolah dalam hal membantu guru-guru baru untuk menetap di sekolah. Ini menyoroti perspektif guru baru tentang perasaan mereka menjadi bagian dari sekolah dan penerimaan ditunjukkan dari lingkungan baru tersebut. Nilai-nilai inklusif seperti: anti-diskriminasi, demokratis, kolaboratif, dan hak, adalah fokus penelitian ini, yang mencari cara sekolah mengartikulasikan dan menerapkan nilai-nilai inklusi (Booth & Ainscow, 2011). Banyak guru PAUD masih merasa bahwa pengetahuan mereka untuk menerapkan nilai-nilai inklusi tidak memadai, terutama bagaimana memberlakukan kebijakan inklusi di kelas mereka sendiri (Black-Hawkins & Florian, 2012). Oleh karena itu, melakukan penelitian ini membawa umpan balik yang mendalam untuk kebijakan, misalnya, prinsip sekolah untuk bekerja sama menuju pendidikan inklusif yang sepenuhnya.

Tujuan kedua adalah menganalisis secara kritis perspektif guru mengenai praktik mereka untuk memberikan kebutuhan belajar bagi semua siswa. Ini mengacu pada berbagai tindakan dan kegiatan yang berfokus pada “memperluas apa yang umumnya tersedia untuk semua orang sehingga semua peserta didik dapat berpartisipasi dalam komunitas kelas” (Black-Hawkins & Florian, 2012, p. 569). Berfokus pada kolaborasi antara guru dan profesi lain seperti pustakawan, dalam hal berbagi pengetahuan dan gagasan sangat penting untuk praktik inklusif yang baik. Black-Hawkins dan Florian (2012) berpendapat bahwa guru umumnya memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, namun, mereka sering cemas bekerja dengan berbagai kemampuan peserta didik. Mereka membutuhkan dukungan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mempersiapkan kebutuhan peserta didik (Black Hawkins & Florian, 2012).

Adapun penelitian ini menyediakan informasi umum tentang kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di sekolah dilihat dari perspektif guru. Booth dan Ainscow (2011) telah mengelompokkan tiga dimensi utama yang mempengaruhi nilai-nilai inklusif: budaya inklusif, kebijakan dan praktik. Dalam penelitian ini, penyelidikan utama adalah untuk menjawab pertanyaan tentang implementasi kebijakan dalam memberikan bantuan bagi guru baru untuk beradaptasi di sekolah dan pengaplikasian bantuan dan kolaborasi yang diperlukan bagi guru guna menyediakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak. Hal ini merupakan dua dari sekian banyak indeks dan nilai pendidikan inklusif menurut Booth dan Ainscow (2011). Untuk itu, pertanyaan besar yang akan diinvestigasi pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru PAUD terhadap indeks dan nilai pendidikan inklusif di Gorontalo, khususnya menyangkut dengan kebijakan dalam memberikan bantuan bagi guru baru untuk beradaptasi di sekolah dan pengaplikasian bantuan dan kolaborasi yang diperlukan bagi guru guna menyediakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, khususnya, studi kasus yang memungkinkan penulis untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dibagikan kelompok budaya yang berkembang seiring waktu (Creswell, 2014, p. 4).

Beberapa sekolah PAUD di Gorontalo dilibatkan dalam penelitian ini. Lokasi sekolah berada di kota Gorontalo yang telah berkomitmen menerapkan kebijakan sekolah inklusif (Provinsi Gorontalo, 2012). Memahami bagaimana para guru menerjemahkan kebijakan ini akan berguna untuk menganalisis dan membentuk kembali kurikulum yang ditujukan untuk pendidikan inklusif yang lebih baik di masa depan (Kurniawati, et al., 2012).

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak dua puluh tiga guru dan staf PAUD dengan status sosial ekonomi (SES), agama dan budaya yang beragam dari beberapa sekolah di Gorontalo. Adapun sampel dari penelitian ini adalah sepuluh guru yang dipilih menggunakan *purposive sampling* yaitu berdasarkan dari kebutuhan penelitian. Guru-guru tersebut diundang untuk terlibat dalam penelitian ini dengan mengisi survei, namun hanya sepuluh guru yang mengirim kembali survei mereka. Sebagian besar guru memiliki durasi kerja beragam baik selama satu tahun hingga empat tahun. Para guru menyebutkan bahwa mereka tidak benar-benar memahami istilah “pendidikan inklusif” tetapi mereka memiliki keinginan besar untuk mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Oleh karena itu, mereka diberi peluang untuk mengajukan klarifikasi atas pertanyaan yang dianggap kurang jelas.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk survei. Proyek ini menggunakan survei yang terdiri dari 30 pernyataan dan pertanyaan, yang menggunakan Scale-

Likert (setuju, tidak yakin dan tidak setuju) dan 4 pertanyaan terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini diadaptasi dari indeks inklusif (Booth & Ainscow, 2011). Sebelum menggunakan survei indeks inklusif ini, peneliti menerjemahkan pertanyaan survei yang berfokus pada dua indikator. Pertama, indikator kebijakan bagaimana guru baru dibantu untuk dapat beradaptasi di lingkungan baru. Kedua, mengetahui praktik kolaborasi di sekolah antara sesama guru, dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan praktik inklusif.

Dalam penelitian ini, penulis telah berkorespondensi dengan guru untuk mengklarifikasi beberapa pertanyaan, untuk menghindari kesalahpahaman. Analisis tematik digunakan untuk membahas topik yang muncul dari kuesioner. Creswell (2014, p. 65) menjelaskan bahwa “tema didasarkan pada pelaporan fakta dan membuat interpretasi dan kegiatan untuk memahami informasi tersebut.” Dengan membaca semua jawaban dalam penelitian ini, penulis menganalisis temuan tersebut ke dalam tema.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis survei dan pertanyaan *open-ended* menggunakan analisis tematik, yang dikelompokkan dalam dua tema utama yang mendukung pengembangan konseptualisasi kebijakan dan praktik inklusif di sekolah.

a. Kebijakan dalam membantu guru baru untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru

Guru-guru memberikan respon yang positif terhadap terhadap dua puluh kuesioner tentang kebijakan untuk membantu mereka beradaptasi di sekolah. Mayoritas guru setuju bahwa pendapat mereka dihargai, biasanya dalam rapat pertemuan dimana mereka diberikan kesempatan untuk mengutarakan ide dan solusi. Pada saat yang bersamaan, guru-guru tersebut juga menyatakan bahwa mereka dibekali informasi yang relevan untuk membantu mereka beradaptasi di sekolah tersebut, seperti yang tertera pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Jumlah guru yang memberikan pendapat pada survei

Dari serangkaian pertanyaan mengenai nilai dan indeks pendidikan inklusif dalam menyambut guru baru di sekolah lima orang guru berpendapat sekolah telah dengan baik memberikan sambutan dan bantuan bagi guru baru. Hal ini meliputi memberikan informasi jumlah guru dan mengenalkan guru baru kepada sesama guru lainnya, guru senior memberikan bantuan dan informasi mengenai aturan yang berlaku di sekolah. Akan tetapi, tiga orang guru beranggapan bahwa kebijakan sekolah belum sepenuhnya memberikan perhatian yang cukup kepada guru contohnya dengan tidak menyediakan mentor bagi guru baru. Dua guru lainnya tidak begitu yakin dengan kebijakan yang ada untuk membantu guru baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Hal ini dikarenakan mereka tidak melihat adanya standar atau peraturan yang jelas mengatur hal ini.

b. Perlunya dukungan dan kolaborasi untuk mendukung kebutuhan anak dalam pembelajaran

Untuk mendukung pembelajaran bagi semua anak, guru mengungkapkan bahwa praktik yang mereka lakukan sangat mendukung untuk dapat bekerja sama dengan guru lain. Mereka setuju bahwa berbagi ide dan proyek bersama adalah hal yang sering dilakukan. Sebagian besar kegiatan untuk melibatkan guru dengan yang lain berasal dari inisiatif guru, seperti proyek pameran kelas bersama, piknik atau klub olahraga. Oleh karena itu, guru sering bekerja sebagai tim untuk mengajar murid mereka bersama. Kolaborasi di antara para guru tidak hanya meningkatkan hubungan antar kolega, tetapi juga menyediakan teladan bagi anak-anak untuk pembelajaran kolaboratif.

Dari gambar 1. mengungkapkan bahwa dari sepuluh guru baru yang disurvei hanya lima yang benar-benar merasa diterima di sekolah saat masa adaptasi mereka. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk membantu guru baru menetap di sekolah belum efektif untuk semua orang. Dalam konteks ini, mengarah ke perasaan terisolasi yang berpotensi menciptakan lingkungan yang kurang kondusif (Jonson, 2008). Oleh karena itu, kontradiksi yang ditunjukkan dalam penelitian ini memberikan kesempatan untuk memeriksa kembali kebijakan yang ada di sekolah ini dalam hal upaya yang maksimal dalam membantu guru baru untuk menyesuaikan diri di sekolah tersebut.

Hal yang cukup menarik adalah beberapa guru mengungkapkan pendapat berbeda mengenai perlakuan yang mereka rasakan berkaitan dengan bantuan yang diberikan saat beradaptasi di sekolah baru. Hal ini kemungkinan terjadi karena kurangnya kebijakan atau aturan formal tentang bagaimana membangun tindakan atau sikap terhadap guru baru. Seorang guru mengatakan bahwa, sekolah tidak memiliki kebijakan formal atau tertulis tentang bagaimana membantu guru baru beradaptasi, misalnya, jika guru tidak mengenal Anda, ia mungkin sulit untuk benar-benar membantu Anda. Ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki kesadaran yang belum maksimal tentang cara menyediakan program atau

tindakan untuk membantu semua guru baru (Black-Hawkins & Lani Florian, 2012; Kurniawati, et al., 2012).

Pengetahuan yang terbatas untuk mengembangkan sekolah inklusif di mana setiap orang harus dihargai secara setara dapat berpotensi sebagai masalah di sekolah ini (Kurniawati, et al., 2012). Selain itu, pemahaman dalam menyikapi nilai-nilai inklusif sangat penting diterapkan untuk membantu guru memahami bahwa keberagaman merupakan hal yang baik. Oleh karena itu, guru baru diharapkan dapat lebih bersemangat dan kreatif dalam terlibat dengan komunitas yang lebih luas dan demokratis, di mana perbedaan dan keanekaragaman dihargai. Pendidikan inklusif seharusnya tidak hanya menghormati dan menghargai semua orang, tetapi juga secara aktif memerangi diskriminasi dan prasangka melalui kebijakan dan tindakan yang sayangnya masih dianggap rendah (Kaplan, et al., 2007, p. 23).

Ditema yang kedua mengungkapkan bahwa meskipun guru memiliki kemauan besar untuk bekerja dengan profesi lain, terutama dengan peneliti atau spesialis untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik mereka namun hal itu sangat jarang terjadi. Mereka mengakui bahwa kurangnya bekerja secara kolaboratif dengan profesi lain, khususnya orang-orang dari luar sekolah menghalangi mereka untuk betul-betul memahami praktik inklusif. Dukungan minim dirasakan utamanya dalam melibatkan orang tua, peneliti, dan sukarelawan masyarakat untuk berdiskusi tentang praktik inklusif yang ideal sangat dirasakan. Faktanya, kolaborasi dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda sangat penting untuk menemukan ide-ide baru yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah merupakan nilai dari pengembangan praktik pendidikan inklusif (Ashman & Elkins, 2009).

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek yang sesuai dengan konteks sekolah adalah memberikan kesempatan bagi guru untuk memberikan pendapat mereka. Misalnya, mengumpulkan umpan balik yang bersifat anonim atau survei dari kebijakan sekolah dan berupaya untuk mendorong nilai-nilai reflektif (Black-Hawkins & Florian, 2012). Strategi ini dipilih untuk memastikan bahwa guru dapat mengemukakan pikiran mereka tanpa rasa takut dan khawatir terhadap orang lain. Namun, sebelum melakukan ini, semua guru harus memahami dengan jelas tujuan untuk menciptakan sekolah inklusif yang lebih baik agar tidak merugikan orang lain. Guru baru juga perlu mengamati orang-orang di sekelilingnya dan di lingkungan sekolah agar menjadi lebih sadar dan reflektif. Oleh karena itu, melalui proses ini, guru dapat mengembangkan praktik mereka sendiri dan menjaga hubungan baik di masa depan dengan rekan guru, siswa, dan orang tua atau wali (Ashman & Elkins, 2009).

Selanjutnya, pembuatan program pendampingan yang memungkinkan guru yang berpengalaman untuk memberikan informasi bagi guru baru. Percakapan

kelompok multi-usia ini harus didasarkan pada konteks dan konten sekolah (Ashman & Elkins, 2009). Namun, program pendampingan tidak hanya fokus pada pembelajaran dari guru yang berpengalaman tetapi juga melibatkan para profesional dan orang tua lainnya. Misalnya mengundang pembicara tamu, seperti peneliti atau psikologi. Singkatnya, strategi-strategi tersebut jelas memberikan motivasi dan rasa percaya diri untuk terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah di sekolah baru (Bentley-Williams, Grima-Farrell, Long & Laws, 2017). Para mentor harus menyoroti dan mendorong guru agar lebih fleksibel untuk menyesuaikan pengajaran mereka dengan kebutuhan lokal (Bentley-Williams, et al., 2017). Singkatnya, menerapkan kebijakan baru mungkin tampak sulit tetapi ketika semua guru berkomitmen untuk ini, semua suara mereka didengar yang mengarah pada perencanaan kurikulum yang fleksibel dan pedagogi yang berfokus pada peserta didik (Ashman & Elkins, 2009).

D. KESIMPULAN

Upaya Indonesia untuk menjadi inklusif masih menghadapi berbagai kendala (Kurniawati, et al., 2012). Meskipun beberapa provinsi telah mendeklarasikan dan mempromosikan pendidikan inklusif, pada kenyataannya, sekolah yang akan mengimplementasikan pendidikan inklusif masih berjuang untuk mengartikulasikan makna sebenarnya dari inklusif (Black-Hawkins & Florian, 2012). Pendidikan inklusif yang umumnya diketahui untuk mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus pada kelas reguler, seharusnya dimaknai lebih luas yaitu menciptakan kesempatan bagi siapa saja untuk memiliki kesempatan bersekolah dan disambut oleh sekolah di lingkungan mereka tanpa melupakan kebutuhan mereka dalam proses belajar mengajar.

Guru-guru di sekolah-sekolah PAUD yang disurvei, nilai dan indeks inklusif telah tampak meskipun sepenuhnya memberikan kebijakan dan praktik inklusif khususnya dalam membantu guru baru menetap di sekolah dan dukungan kolaborasi antar profesi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa guru yang merasa seolah-olah sebagai orang luar sehingga cenderung menciptakan segregasi di antara para guru. Selain itu, minimnya pengetahuan guru mengenai pendidikan inklusif membatasi mereka untuk dapat menyediakan kebutuhan belajar yang sesuai dengan karakter murid.

Perlunya diadakan kebijakan untuk memfasilitasi umpan balik umpan balik yang dilakukan oleh seluruh guru dan pihak terkait dalam merumuskan dan mengevaluasi kembali kebijakan dan praktik yang sesuai dengan nilai dan indeks pendidikan inklusif. Selain itu, program mentoring dirasa perlu sehingga guru dapat merencanakan kegiatan yang fleksibel sesuai kebutuhan murid, guru mudah beradaptasi, dan guru dapat merefleksikan bagaimana menjadi guru yang inklusif (Bentley Williams, et al., 2017).

REFERENSI

- Ashman A. F. & Elkins, J. (2009). *Education for inclusion and diversity* [PDF version]. Retrieved from <https://content.talisaspire.com/qut/bundles/58c748e9e7ebb612508b4568?print=true&download=true&userId=N8%2F076euW4YO MnfivNrKUpp7NvY%3D&key=439faf10e22fe882094c6af9b78dle798d9cb33a9ea5960996fb41b4ae6lece6>
- Bentley-Williams, R., Grima-Farrell, C., Long, J., & Laws, C. (2017). Collaborative partnership: Developing pre-service teachers as inclusive practitioners to support students with disabilities. *International Journal of Disability, Development and Education*, 64(3), 270-282. doi: 10.1080/1034912X.2016.1199851
- Black-Hawkins, K & Florian, L. 2012. Classroom teachers' craft knowledge of their inclusive practice. *Teachers and Teaching Theory and Practice*, 18(5), 567-584. doi: 10.1080/13540602.2012.709732
- Booth, T. & Ainscow, M. (2011). *Index for inclusion: Developing learning and participation schools* [PDF version]. Retrieved from <https://blackboard.qut.edu.au/bbcswebdav/pid-6627088-dt-content-rid77675201/courses/LCN62917sel/LCN62917selImportedContent20170119045201/index%281%29.pdf>
- Carrington, S. & Macarthur, J. (2012). *Teaching in inclusive school communities*. Milton, Qld: John Wiley & Sons Australia.
- Creswell, J. W. (2014). *Educational research: Planning, conducting and evaluating qualitative and quantitative research* (4th ed.). London, England: Licensing Agency
- Danforth, S. & Jones, P. (2015). From special education to integration to genuine inclusion *Foundation of inclusive education research*, 6, 1-21. doi: 14793636/doi:10.1108/S1479-363620150000006014
- Hardiyanti, W. E., Ilham, M., & Suziman, A. (2020). Examining the role of teachers in reform of early childhood education in Indonesia. *Jurnal Sultra Elementary School*, 1(1), 57-64. Retrieved from <http://ejournal.unsultra.id/index.php/JSES/article/viewFile/5/5>
- Inclusive International. (2009). A global report: Better education for all: When we're included too. Retrieved from <https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWsP6WmojtAhVHERwKHfo3Dh8QFggcMAA&url=http>

<http://inclusion-international.org/better-education-forall&usg=AFQjCNGCHYIPOGNJS8MZ8W6vHwVhulVSIA&sig2=dqPbkBsRVwljN39JbsxPTg&bvm=bv.151325232.d.dGc>

- Kurniawati, F. Minnaert, A. Mangunsong, F., & Ahmed, W. (2012). Empirical study on primary school teachers' attitudes towards inclusive education in Jakarta, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 69, 1430-1436. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.082
- Mitchell, D. (2014). *What really works in special and inclusive education* (2nd ed.) Abingdon, Oxon: Routledge.
- Sharma, U. & Sokal, L. (2015). The impact of a teacher education course on pre-service teachers beliefs about inclusion: an international comparison. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 15(4), 276-284. doi: 10.1111/1471-3802.12043
- Pearson, S. (2016). *Rethinking children and inclusive education: Opportunities and complexities*. New York, USA: Blomsburry Publishing Plc.
- Provinsi Gorontalo, 2012. Anak Berkebutuhan Khusus Berhak Sekolah. Diakses dari <https://www.gorontaloprov.go.id/informasi/berita/prov-gorontalo/anak-berkebutuhan-khusus-berhak-sekolah>
- Queensland Government, Department of Education and Training. (2010). Reasonable adjustment in teaching, learning and assessment for learners with a disability, a guide **for** VET practitioners. Retrieved from <https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCmtDXkojTAhUEgLWKHRbXCOoQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.adcet.edu.au%2Fdownload%2Fattachment%2F73831%2F&usg=AFQjCNFfUeo2P97dhciByvPqs4LillMhg&sig2=vxZL9lbp3AXY4GZhgi33mw&bvm=bv.151325232.d.dGc>
- Unesco, Ministry of Education and Science, Spain. (1994) *World conference on special needs education: Access and quality (Salamanca, Spain)* Retrieved from <http://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ7pmikP7SALVU9mMKHQpwDC4QFggBMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Feducation%2Fpdf%2FSALAMAE.PDF&usg=AFQjCNFKOXOBRgdZtelx47A1Cvb13XVaw&sig2=2XVCONOFxfh3OVAmPsd4>